

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mengacu hasil pengolahan data yang telah dilakukan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah Provinsi Banten, seperti variabel Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB selama periode 2014 hingga 2023.

1. Dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat Pendidikan di Provinsi Banten mempunyai dampak negatif yang signifikan pada peningkatan pengangguran terbuka. Rendahnya kualitas pendidikan menimbulkan ketidaksesuaian antara dan kebutuhan pasar dan keterampilan tenaga kerja sehingga banyak penduduk tidak mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan, khususnya pada sektor-sektor yang memerlukan keahlian tertentu. Kondisi ini semakin diperburuk oleh faktor eksternal seperti migrasi penduduk dan kebijakan pendidikan yang belum efektif, yang secara keseluruhan berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat serta menghambat stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
2. Kenaikan upah minimum di Provinsi Banten memiliki hubungan positif signifikan dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka, karena kenaikan upah mendorong naiknya biaya produksi yang membuat perusahaan, terutama di sektor padat karya dan usaha kecil-menengah, mengurangi tenaga kerja atau menunda perekrutan baru. Kondisi ini diperburuk ketika kenaikan upah tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga efisiensi ekonomi menurun dan daya

saing industri melemah. Akibatnya, kebijakan upah minimum yang tidak disertai peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja justru berpotensi memperbesar angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

3. Ketidaksignifikanan pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini belum bersifat inklusif dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja secara merata. Peningkatan PDRB yang didorong oleh sektor-sektor padat modal, ketimpangan wilayah, serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada penurunan pengangguran. Dengan demikian, peningkatan PDRB tanpa pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak cukup efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran di Banten. pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan pengangguran.

Dengan demikian, alasan utama dari kesimpulan ini adalah bahwa pengangguran di Banten bukan hanya persoalan kurangnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga masalah kualitas tenaga kerja dan ketidakseimbangan struktur ekonomi. Kebijakan yang hanya berfokus pada pertumbuhan PDRB atau kenaikan UMP tanpa disertai perbaikan mutu pengajaran vokasional, pelatihan kerja yang relevan, dan insentif sektor padat karya, tidak akan cukup untuk menurunkan pengangguran secara signifikan. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan pendidikan, upah, dan pembangunan ekonomi secara seimbang demi tercapainya peningkatan ekonomi bersifat inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

## 5.2 Saran

Mengacu pada analisis dan kesimpulan yang sudah diperoleh, penulis memahami jika penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut berupa rekomendasi. Oleh sebab itu, bagian ini memuat beberapa masukan yang diharapkan dapat memberi manfaat guna pemerintah daerah, kalangan akademisi, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten melalui peningkatan mutu pendidikan, penetapan kebijakan upah yang lebih tepat sasaran, dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Pemerintah Daerah perlu segera memperkuat kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelatihan kerja yang secara langsung disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, guna memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai dan relevan. Dengan meningkatkan kolaborasi antar dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, serta pelaku usaha, upaya ini dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif, sehingga kompetensi tenaga kerja tidak hanya memenuhi tetapi juga mengantisipasi permintaan pasar yang terus berkembang.
2. Kebijakan penetapan upah minimum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor produktivitas tenaga kerja serta kemampuan finansial sektor usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban biaya operasional yang berlebihan bagi para pelaku bisnis. Dengan pendekatan yang seimbang ini, risiko peningkatan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau penutupan usaha dapat diminimalkan,

sehingga tercipta harmonisasi antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan sektor ekonomi yang lebih luas.

3. Dunia Usaha dan Industri diharapkan untuk lebih proaktif dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, dengan cara aktif melibatkan diri melalui program magang yang menghadirkan pengalaman nyata di lapangan, pelatihan berbasis industri yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah vokasi. Pendekatan ini tidak hanya akan berkontribusi dalam menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan siap pakai, tetapi juga memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan, sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
4. Bagi peneliti berikutnya diharap dapat memperluas variabel tambahan seperti tingkat investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat inflasi dalam analisis. Penambahan variabel-variabel ini akan menyuguhkan perspektif yang lebih menyeluruh terkait aspek-aspek penentu pengangguran di Provinsi Banten, karena mereka mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih luas, seperti pengaruh modal terhadap lapangan kerja dan tekanan harga terhadap daya beli. Dengan demikian, studi mendatang dapat mengungkap interaksi yang lebih mendalam antara aspek-aspek ini, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi dan efektif.